

Dari Embung ke Kelas: Refleksi Interseksional Feminis tentang Air Bersih, Pendidikan, dan Ketimpangan Gender di NTT

From Reservoirs to Classrooms: Feminist Intersectional Reflections on Clean Water, Education, and Gender Inequality in NTT

Dini Widiastuti

Plan Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

Dini.Widiastuti@plan-international.org

Kode Naskah: Kronologi Naskah: diterima 1 Juli 2026, direvisi 2 Agustus 2026, diputuskan diterima 28 September 2026

Abstract

This article examines the interconnections between education, clean water access, gender norms, climate vulnerability, and structural inequality through the author's lived experience and more than twenty-five years of work in development and humanitarian organizations focused on gender equality and children's rights. Drawing on the Capability Approach, Feminist Political Ecology, intersectionality, and critical perspectives on development inequality, the paper situates personal observations within a broader theoretical framework. It argues that educational injustice cannot be understood in isolation from basic infrastructure and socio-ecological conditions. Using comparative analysis of educational indicators—such as school participation and dropout rates, particularly among girls—alongside data on clean water access and drought, the paper identifies a consistent association between children's access to education and their access to clean water, while showing that this relationship is mediated by gender norms, poverty, geography, and socio-ecological conditions. The paper further argues that these inequalities are embedded in gendered social institutions, including marriage practices and belief, which may shape women's agency and the value attached to girls' education.

Keywords: education, clean water, climate vulnerability, intersectionality, Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Artikel ini mengkaji keterkaitan antara pendidikan, akses air bersih, norma gender, kerentanan iklim, dan ketimpangan struktural melalui pengalaman hidup penulis serta kiprahnya selama lebih dari dua puluh lima tahun di berbagai organisasi pembangunan dan kemanusiaan yang berfokus pada kesetaraan gender dan hak-hak anak. Dengan mengacu pada Pendekatan Kapabilitas, *Feminist Political Ecology* (FPE), interseksionalitas, dan perspektif kritis mengenai ketimpangan pembangunan, tulisan ini menempatkan pengamatan pribadi dalam kerangka teoretis yang lebih luas. Artikel ini berargumen bahwa ketidakadilan dalam pendidikan tidak dapat dipahami secara terpisah dari infrastruktur dasar dan kondisi sosio-ekologis. Melalui analisis komparatif terhadap indikator pendidikan—seperti partisipasi sekolah dan angka putus sekolah, khususnya di kalangan anak perempuan—serta data mengenai akses air bersih dan kekeringan, artikel ini mengidentifikasi adanya hubungan yang konsisten antara akses anak terhadap pendidikan dan akses mereka terhadap air bersih, sekaligus menunjukkan bahwa hubungan tersebut dimediasi oleh norma gender, kemiskinan, kondisi geografis, dan faktor sosio-ekologis. Lebih lanjut, artikel ini menyatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan tersebut berakar pada institusi sosial yang sarat dengan dimensi gender—termasuk praktik pernikahan dan sistem kepercayaan—yang dapat memengaruhi agensi perempuan serta nilai yang dilekatkan pada pendidikan untuk anak perempuan.

Kata kunci: pendidikan, air bersih, kerentanan iklim, interseksionalitas, Nusa Tenggara Timur

Pendahuluan

Saya selalu percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan demi masa depan yang lebih baik bagi seorang anak, bangsa, dan bahkan kemanusiaan. Sebagai anak seorang dosen di perguruan tinggi pendidikan dan tinggal di lingkungan kampus IKIP,¹ masa kecil saya dikelilingi oleh segala hal yang berbau pendidikan. Sejak kecil, saya tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan pendidikan. Sebagai seorang anak dosen IKIP, ayah saya mengajarkan kepada saya bahwa pendidikan

bukan hanya semata-mata proses memperoleh ijazah, melainkan ruang untuk membangun kemampuan untuk berpikir, kemandirian, dan keadilan. Percakapan kami sehari-hari adalah mengenai kualitas pendidikan dan ketimpangan kesempatan belajar yang kemudian membentuk cara saya melihat pendidikan sebagai bagian penting dari pembangunan manusia.

Dari perbincangan di meja makan bersama ayah di awal tahun 80-an itu, saya belajar tentang nilai-nilai keadilan, dedikasi total kepada profesi, dan juga bahwa kualitas pendidikan dasar menengah di Indonesia tidak

bisa menghasilkan lulusan yang siap mengenyam proses dan materi pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi. Perlu banyak sesi pengayaan dan pendampingan diberikan kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa dari luar daerah agar bisa mengikuti perkuliahan dengan baik.

Bagaimana dengan isu kesetaraan gender yang sejak beberapa dekade lalu menjadi bagian dari pekerjaan saya? Isu ini menjadi dekat dengan saya karena sosok ibu saya, seorang perempuan kuat yang memastikan semua kebutuhan kami di rumah terutama untuk pendidikan terpenuhi. Ibu adalah seorang mantan guru yang memutuskan berdagang karena penghasilan ayah saya, seorang dosen yang lebih suka mengajar dan membimbing mahasiswa.

Ibu sendiri adalah contoh nyata keteguhan seorang anak perempuan yang lari dari rumah karena dilarang sekolah, hanya karena dia seorang anak perempuan. Beliau akhirnya bisa menamatkan sekolah dan bahkan menyelesaikan D3 pendidikan guru. Ironisnya, pada masa itu, saya justru belum mengenali pengalaman ibu saya sebagai pengalaman ketidakadilan gender. Pemahaman tersebut baru saya peroleh ketika saya mulai bekerja bersama perempuan dari berbagai komunitas dan para perempuan di berbagai kalangan. Saya melihat bahwa tidak semua perempuan sekuat dan seberdaya ibu saya. Kerap mereka tidak bisa keluar dari kurungan norma sosial, adat, dan agama. Mereka tidak bisa mengatasi hambatan yang dikondisikan oleh sistem dan berbagai jenis ketimpangan yang melingkupi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

Dari ibu, saya mencontoh kerja keras dan resiliensi sebagai seorang perempuan. Ibu menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi apa pun yang diinginkan melalui kerja keras dan kerja lebih keras. Ibu adalah *role model* saya untuk mendobrak norma yang menghambat perempuan. Harapannya pada anak perempuannya adalah menjadi orang yang berpendidikan setinggi mungkin karena pendidikan adalah kunci keberhasilan.

Ketika mendaftar kuliah dan harus memilih bidang studi, saya tidak mengambil jurusan pendidikan karena masih punya bayangan bahwa itu adalah jurusan buangan yang tidak menjanjikan masa depan yang cerah. Saya justru memilih latar belakang ilmu ekonomi yang memengaruhi cara saya memahami pembangunan sebagai proses peningkatan kesejahteraan dan kapabilitas manusia. Pengalaman bekerja di berbagai organisasi pembangunan dan kemanusiaan juga memperluas perspektif tersebut. Dalam pekerjaan

lapangan, saya juga mulai melihat bahwa ketimpangan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh gender, lokasi, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan kelompok marginal yang terpinggirkan dalam menyuarakan kepentingannya.

Di periode terakhir ini, saya banyak terlibat dalam program yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan perempuan khususnya atas sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Saya juga memimpin advokasi dan kampanye untuk keadilan pangan dan kampanye anti ketimpangan.² Keduanya memberikan saya pengertian yang lebih mendalam mengenai isu-isu ketimpangan, kerentanan, dan akar dari ketimpangan dan kerentanan tersebut. Melalui program-program ini, saya bertemu dengan nona-nona dan mama-mama dari berbagai daerah di Indonesia yang memperjuangkan hak mereka atas tanah dan sumber airnya; yang memperjuangkan hak mereka untuk bersuara dan diakui. Dalam kondisi pascabencana, kedua hal inilah, ketimpangan dan kerentanan, yang menentukan apakah sekelompok orang atau komunitas bisa menghadapi dampak dari sebuah bencana. Anak-anak, perempuan, orang tua, dan disabilitas menjadi kelompok yang lebih rentan dan kerap kali tidak diperhitungkan dan diajak bicara dalam pengembangan program respons bencana.

Selama saya berkutat dengan isu pendidikan, yang perlu dibahas untuk memastikan keberhasilan pendidikan adalah kualitas guru, kurikulum, metode pengajaran dan pembelajaran, serta kesejahteraan guru. Isu akses dan ketersediaan air bersih tidak pernah dibahas sebagai bagian dari formula keberhasilan pendidikan. Baru ketika saya bekerja di Plan Indonesia, melihat secara langsung dampak dari kelangkaan dan sulitnya akses air bersih terhadap pendidikan, kesehatan, dan bahkan kekerasan yang dialami anak-anak NTT, terutama yang perempuan. Air bersih menjadi awal segalanya, sebuah prekondisi bagi pendidikan dan pembangunan.

Sebagai orang yang dibesarkan di Jakarta, saya hanya berjalan sejauh 3-5 meter dalam membuka keran dan sudah dapat mengakses air bersih. Yang saya saksikan di banyak komunitas di NTT tempat Plan Indonesia bekerja, telah membukakan mata saya. Anak-anak di sana banyak yang harus berjalan berkilo-kilo meter sebelum berangkat sekolah, bahkan terkadang di pagi buta harus mengambil air bersih di sumber mata air, baik sumur di desa tetangga ataupun kali kecil. Di musim kering, mereka harus berjalan lebih jauh dan terkadang hal ini menyebabkan terlambat ke sekolah.

"Kami pulang mendaki. Kalau *capek*, kami istirahat dulu, baru jalan lagi. Sampai di rumah, siap-siap, baru ke sekolah. Kadang terlambat. Kalau terlambat, dihukum disuruh berlutut" (Eci 2024, Wawancara Anak Dampungan Plan Indonesia 14 Tahun).

Pengalaman tersebut memunculkan pertanyaan yang kemudian menjadi dasar tulisan ini: sejauh mana akses terhadap air bersih memengaruhi kesempatan pendidikan anak, terutama anak perempuan dan bagaimana gender, kemiskinan, kondisi geografis, serta norma sosial membuat dampak kekeringan menjadi tidak sama bagi setiap anak?

Metode Penelitian

Tulisan ini berlandaskan pada pengalaman pribadi saya yang membentuk nilai-nilai, pandangan atas keadilan dan kesetaraan serta pentingnya pendidikan, digabungkan dengan pengamatan sepanjang karier di LSM yang saya tuliskan dalam bentuk autoetnografi. Autoetnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pengalaman pribadi dari peneliti sebagai data utama untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang lebih luas (Ellis 2004; Denzin 2014). Berbeda dengan autoetnografi pada umumnya, saya menggunakan autoetnografi feminis (Allen & Piercy 2005). Tulisan ini didasarkan pada pengalaman pribadi saya sebagai seorang penulis yang meletakkan hasil refleksi atas pengalaman pribadi dan pengamatan dengan kacamata feminis. Data kualitatif yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari refleksi saya selama bekerja di organisasi pembangunan dan kemanusiaan, termasuk kunjungan ke komunitas dampungan di NTT dan dengan anak, perempuan, keluarga, serta pemangku kepentingan lokal. Observasi yang saya lakukan tidak dimaksudkan sebagai survei kualitatif yang representatif, melainkan sebagai pengalaman empiris yang direfleksikan secara kritis dan dipertautkan dengan data sekunder mengenai akses air, kekeringan, angka partisipasi sekolah (APS), dan putus sekolah. Tulisan ini menggunakan landasan teoretis tentang *Human Capital* yang dipelopori oleh ekonom Gary Becker (1993) & Theodore Schultz (1961; 1963) serta *Capability Approach* dari Amartya Sen (1999) & Martha Nussbaum (2000).

Ketimpangan yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dapat dipahami dengan menggunakan teori interseksionalitas yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk opresi menciptakan pengalaman peminggiran atau

marjinalisasi yang unik. Marjinalisasi ini berasal dan sekaligus memberikan dampak kepada akses terhadap sumber daya, termasuk sumber daya alam yang merupakan basis kehidupan yaitu air (Crenshaw 2017). Kenyataan yang saya temui di daerah-daerah, baik saat bersama Plan Indonesia maupun di organisasi-organisasi sebelumnya, perempuan-perempuan masih terpinggirkan. Dimensi ekologis ketimpangan dijelaskan melalui *Feminist Political Ecology*, yang menekankan bahwa akses terhadap sumber daya alam, termasuk air, selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan struktur gender.

Paulo Freire (1970) menjelaskan bahwa isu pendidikan merupakan landasan untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan, terutama bagi anak perempuan, terlepas dari apakah pendidikan dilihat sebagai sebuah proses yang meningkatkan nilai ekonomi seseorang atau proses humanisasi. Saya menggunakan data sekunder untuk analisa kuantitatif Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan tingkat putus sekolah dalam melihat kaitan antara pendidikan dan air bersih. Hal ini tersegregasi berdasarkan tingkat pendidikan dan gender serta kondisi kelangkaan air di dunia yang tercerminkan dalam *Water Scarcity Index* untuk melihat korelasi antara *dropout rate* atau menurunnya APS dan kekeringan di NTT, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan daerah dampungan utama Plan Indonesia.

Dengan mengintegrasikan berbagai teori tersebut beserta data-data kuantitatif dan kerangka Konvenan Hak-Hak Anak (UNCRC), saya ingin menunjukkan keterkaitan antara dua hak anak: (1) hak atas pendidikan dan (2) hak atas air bersih. Selain itu, tulisan ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman holistik bahwa ketimpangan dalam akses air bersih dan pendidikan di NTT tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, relasi kekuasaan, ketimpangan geografis, serta kondisi ekologis yang lebih luas. Metode dan kerangka teori ini diharapkan akan memunculkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis dan transformatif sehingga dapat memberikan kontribusi pada upaya dekolonisasi pengetahuan dan perumusan kebijakan yang lebih adil dan kontekstual.

Pendidikan: Hak, Investasi, Pembebasan, atau Janji Kosong?

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990, menegaskan bahwa hak anak untuk memperoleh

pendidikan, kesehatan, standar hidup yang layak, termasuk juga hak akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak. Kedua yang terakhir menjadi bagian penting dari pemenuhan hak dasar anak. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental.

Pasal 28 dan 29 dari Konvensi Hak-Hak Anak secara spesifik menjamin hak anak atas pendidikan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan mental anak untuk mencapai potensi terbaiknya. Dalam kenyataannya, jaminan hak anak atas pendidikan belum bisa dinikmati oleh semua anak di seluruh dunia. Selama dua puluh lima tahun terakhir, akses atas pendidikan sudah berkembang secara dramatis, namun ketimpangan masih terjadi akibat konflik, perubahan iklim, norma gender, serta jurang digital (United Nations 1989).

Menurut laporan UNESCO (2025), *"The right to education: past, present, and future directions"*, 82 persen dari negara-negara di dunia saat ini telah menjamin pendidikan gratis untuk minimum 9 tahun sekolah dasar dan menengah. Hal ini merupakan kemajuan pesat jika dibandingkan situasi di tahun 2000. Data menunjukkan hanya 56 persen negara yang menjamin pendidikan gratis 9 tahun. Jumlah siswa yang mendaftar untuk pendidikan tinggi pun telah melebihi dua kali lipat dari sebelumnya yaitu dari 100 juta di tahun 2000 menjadi 264 juta di 2023. Pemerintah Indonesia bahkan telah memulai program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015. Bahkan di dalam RPJMN 2025--2029, salah satu program prioritas nasional adalah Wajib Belajar 13 tahun yang meliputi 1 tahun Pendidikan Prasekolah, 9 tahun Pendidikan Dasar, dan 3 tahun Pendidikan Menengah. Pada kenyataannya, wajib belajar 12 tahun masih menjadi tantangan (Kemen-PPN/Bappenas 2025). Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16--18 berada di angka 76,20 persen di tahun 2025. Angka putus sekolah masih kerap terjadi di jenjang transisi SMP ke SMA. Bahkan, data BPS menunjukkan *drop* sebesar 20 persen antara APS SMP dan SMA (BPS 2025).

Data dari Rapor Pendidikan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT (2023) menunjukkan bahwa angka Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 145.268 anak. Angka ini tersebar di 22 kabupaten/kota, dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memiliki angka ATS terbesar yaitu 22.459, diikuti oleh Kabupaten Sumba Barat Daya 13.900, dan Kabupaten Kupang 11.628 anak (Tribun Flores 2025). Alasan anak tidak bersekolah bukan hanya karena biaya bersekolah mahal, tetapi juga karena alasan letak sekolah yang

jauh dan merasa pendidikan sudah cukup. Ini juga yang kerap saya temui di NTT dan juga di kampung-kampung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pandangan yang saya yakini sebagai sesuatu yang hakiki yaitu bahwa "pendidikan adalah sebuah investasi yang paling berharga untuk seorang anak" belum tentu diamini oleh orang tua dan anak-anak di pedesaan.

Ketika memulai pekerjaan, saya belum bisa memahami mengapa sepasang orang tua dapat menarik anak mereka dari sekolah. Dalam bayangan saya waktu itu, apabila bersekolah lebih tinggi, maka prospek untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga lebih tinggi. Pandangan saya ini sejalan dengan Teori *Human Capital* dari Schultz (1961) dan Becker (1993), yang menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan keterampilan adalah investasi untuk meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam refleksi saya, keyakinan mengenai pendidikan sebagai investasi jangka panjang bukan dibatasi hanya karena kedua ekonom tersebut, tetapi pengaruh pentingnya pendidikan juga saya dapatkan dari kedua orang tua saya.

Ayah saya adalah generasi pertama dari keluarga besarnya yang bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Di tahun 60-an, menjadi seorang Doktorandus (Drs.) masih menjadi sebuah prestasi yang tinggi, terlebih ketika gelar sarjana belum mengalami devaluasi nilai seperti sekarang ini. Menjadi sarjana di bidang pendidikan jasmani merupakan sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi keluarga besar dan bahkan kampungnya. Sebuah lompatan besar dari ayah dan ibu yang hanya berpendidikan Sekolah Rakyat. Setelah menjadi Dekan di Sekolah Tinggi Olah Raga (STO) di Padang, Sumatra Barat, di usia yang masih sangat muda, ayah saya menamatkan kuliah magisternya, masih di bidang ilmu olah raga untuk perjalanan karier selanjutnya.

Ibu saya juga merupakan orang pertama dari keluarganya yang bersekolah hingga tahap Sarjana Muda. Hal ini merupakan lompatan dari seorang anak perempuan yang dilarang untuk melanjutkan sekolah ke SMA karena gendernya. Terlebih, keluarganya tidak menganggap bahwa bagi anak perempuan, melanjutkan pendidikan adalah investasi yang tepat. Ibu saya tidak menurunkannya kepada anak-anaknya. Ia berjuang dengan teguh untuk memastikan dirinya dan anak-anaknya bisa sekolah hingga ke perguruan tinggi.

Kedua orang tua saya tidak mengenal teori pendidikan yang membebaskan seperti yang dijelaskan oleh Freire (1970), tetapi menurut saya, keduanya adalah

praktisi dari teori tersebut. Ibu saya membebaskan dirinya dari belenggu norma keluarga dan adat yang tidak menitikberatkan pendidikan bagi anak perempuan. Ayah saya adalah seorang pendidik yang mencurahkan waktu, energi, dan perhatiannya untuk mengembangkan anak-anak didiknya agar mereka punya agensi, daya berpikir kritis, dan membangun solidaritas. Walaupun tidak punya posisi formal di kampus tersebut, ibu saya adalah seorang yang aktif. Dengan lokasi rumah kami yang ada di lingkungan kampus, maka beliau pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kampus.

Perkawinan, Belis, dan Pilihan Anak Perempuan

Saya baru menyadari bahwa saya tidak pernah menanyakan hal yang sama kepada anak-anak remaja yang saya temui di kampung-kampung mengenai pilihan. Selama ini, saya hanya menangkap kesan bahwa bersekolah bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Selain itu, bersekolah dan *notabene* pendidikan, di jenjang sekolah menengah, tidak lagi dilihat sebagai sebuah cara menghabiskan waktu yang bermanfaat bagi masa depan. Bagi banyak orang desa yang karakter masyarakat agrarisnya masih kental, masa depan adalah sesuatu yang abstrak. Sementara, bagi saya, teman-teman saya, keluarga saya, kami menyaksikan bagaimana pendidikan mengangkat derajat kehidupan seseorang dan bersamanya mobilitas sosial orang tersebut meningkat.

Satu komentar dari seorang anak muda yang saya temui di sebuah desa di Kabupaten Lombok Utara, NTB cukup menyadarkan saya bahwa kami berada di dua dunia yang berbeda.

“Mau berhenti sekolah di SMP atau di SMA sama saja. Di sini tidak ada *kerjaan*. Jadi, untuk apa lama-lama sekolah” (Fira 2024, Wawancara Anak Dampungan Plan Indonesia 18 Tahun).

Oleh sebab itu, tidak heran bila Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi NTB adalah 8,25 tahun untuk laki-laki dan 7,15 tahun untuk perempuan berdasarkan data tahun 2023. Bahkan di beberapa kabupaten seperti di Lombok Utara, angka RLS adalah 7,13 untuk laki-laki dan 5,53 untuk perempuan (BPS NTB 2024). Artinya, anak-anak NTB terutama yang perempuan berhenti bersekolah di kelas 2-3 SMP dan bahkan di Lombok Utara lebih awal lagi. Tidak heran jika melalui data, NTB dinyatakan memiliki angka perkawinan anak yang tertinggi di Indonesia yaitu sekitar 17,32 persen (BPS 2023).

Dalam Gilligan, Lyons, & Hamner (1990), mereka berargumen bahwa periode usia sebelas dan enam belas adalah masa yang krusial bagi pembentukan identitas seorang remaja perempuan. Masa ini adalah masa ketika remaja perempuan belajar untuk membungkam intuisi moral dalam dirinya (*inner moral intuitions*) dan lebih mendahulukan standar moral berdasarkan aturan (*rule bound interpretation of moral reasoning*). Akibatnya, suara perlawanan menjadi terdiam dan mereka mengalami pemisahan antara diri, pikiran, dan raga mereka, yang dapat termanifestasi menjadi berbagai masalah, seperti *eating disorder*, aspirasi kepemimpinan yang rendah, serta pilihan seksual yang merugikan. Meskipun kondisi di Emma Willard School di Amerika yang dibahas dalam buku tersebut berbeda dengan kondisi para remaja perempuan yang saya temui di Lombok Utara dan di banyak desa di Indonesia Timur, periode usia 11 hingga 16 tahun memberikan rentang kerentanan yang sama bagi anak-anak perempuan. Dengan demikian, keputusan untuk berhenti bersekolah di rentang usia ini, tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi tetapi juga kesehatan dan sosial.

Pilihan untuk berhenti sekolah dan menikah pada usia anak tidak hanya berkaitan dengan persepsi mengenai manfaat pendidikan, tetapi juga perlu dilihat dalam konteks institusi sosial dan ekonomi perkawinan. Dalam sejumlah komunitas di NTT, praktik belis merupakan bagian penting dari proses perkawinan dan memiliki makna sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Terlebih, dalam relasi sosial yang patriarkal, praktik perkawinan, dan belis, dapat berinteraksi dengan posisi ekonomi keluarga, pembagian peran gender, dan posisi tawar perempuan.

Bagi keluarga yang tidak mampu, persoalan ini jauh lebih kompleks. Ketika pilihan pendidikan anak perempuan dibatasi oleh biaya, jarak, pekerjaan domestik, dan norma gender, perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu jalan untuk menuju status sosial dan keamanan ekonomi. Dalam konteks demikian, institusi perkawinan berpotensi mempersempit pilihan yang tersedia bagi anak perempuan, terutama ketika mereka tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan masa depan pendidikannya sendiri. Teori *Human Capital* dalam konteks ini ternyata tidak dapat diterapkan seutuhnya. Ada ketidakadilan struktural, ketimpangan gender, serta perbedaan desa-kota yang menyebabkan pendidikan berhenti. Hal tersebut dianggap sebagai investasi yang memberikan *Return of Investment* yang positif terutama ketika anak-anak

perempuan mencapai usia remaja (*adolescent*).³ Ketika anak-anak tersebut berhenti sekolah dan cenderung kawin di usia anak, yang secara legal melanggar hukum negara tetapi secara sosial dan budaya⁴ lebih dapat diterima bahkan didukung dan tidak dianggap sebagai keresahan orang tua dan masyarakat. Sebaliknya, terkadang ada motif ekonomi dari sebuah perkawinan anak, seperti pengurangan beban ekonomi keluarga anak perempuan yang dikawinkan dan pindah ke keluarga suaminya ataupun status 'kawin' menjadi basis untuk bisa mendapatkan status 'dewasa', yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (yang hanya bisa dimiliki setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah). Akhirnya, dianggap sebagai *gain* karena dapat digunakan untuk melamar sebagai pekerja migran.⁵

Dengan demikian, perkawinan anak, belis, dan hak anak perempuan tidak bisa hanya dibaca sebagai faktor yang berdiri sendiri, tetapi sebagai salah satu institusi yang dapat berinteraksi dengan kemiskinan dan norma patriarkal dalam membentuk pilihan hidup perempuan. Di sinilah pendekatan interseksional menjadi penting. Pengalaman seorang anak perempuan tidak hanya ditentukan oleh gendernya, tetapi juga oleh kelas sosial, lokasi geografis, usia, posisi dalam keluarga, dan struktur perkawinan yang berlaku di komunitasnya.

Air Sumber Kehidupan, Air Prasyarat Pendidikan

Seperti kata pepatah "*Lain ladang, lain belalang*", di banyak daerah di NTT ada hambatan lain yang saya temui dalam memastikan hak anak atas pendidikan terpenuhi. Faktor air bersih yang selama ini tidak pernah dipertimbangkan sebagai salah satu faktor krusial bagi keberlanjutan pendidikan anak seharusnya menjadi konsentrasi utama untuk kesejahteraan anak. Misalnya, ketika melakukan pendampingan bersama Plan Indonesia di daerah yang rentan kekeringan seperti di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), terlihat secara nyata bahwa kelangkaan air bersih merupakan hambatan bagi kehidupan masyarakat, terlebih untuk anak-anak.

Ketika saya mulai bertugas di awal tahun 2018, ada lebih dari 10.000 anak dampingan Plan Indonesia di TTS dan lebih dari 50 persen anak-anak dampingan Plan Indonesia harus berjalan lebih dari 30 menit untuk mengambil air bersih. Bahkan di musim kering, mereka harus berjalan lebih jauh lagi, naik turun gunung dan keluar masuk daerah hutan dan ladang, hingga selama 2 jam. Sebelum sekolah, anak-anak perempuan seperti anak dampingan Plan, Kesia (9 tahun), pagi-pagi sekali pergi bersama teman-temannya ke mata air yang

berjarak satu jam dari rumahnya, untuk mandi dan ambil air untuk dibawa pulang dengan ember atau jerigen. Kadang mereka jadi terlambat sampai di sekolah (Plan Indonesia 2026).

Dapat dibayangkan akibat kekeringan yang berkepanjangan bagi Kesia dan teman-temannya. Di tahun 2026, BNPB memprediksi NTB akan mengalami El Nino⁶ yang kuat atau dijuluki *Godzilla El Nino* yang terjadi ketika musim kemarau lebih panjang sehingga curah hujan turun drastis. Akibatnya, sumur dangkal mengering, debit sungai turun, dan waduk serta embung menyusut. Ini berarti akses air bersih menjadi makin sulit dan waktu mengambil air meningkat (terutama bagi perempuan dan anak perempuan). Selain itu, NTT merupakan wilayah paling rentan karena iklimnya semi-arid, dengan curah hujan rendah bahkan tanpa El Nino, infrastruktur air terbatas dan kondisi sosial-ekonomi yang rentan (Distankp NTT 2026).

Sebagaimana yang dipaparkan oleh UNESCO (2025) dalam laporan "*The right to education: past, present, and future directions*", dampak dari perubahan iklim, terutama panas yang ekstrim, kekeringan, dan bencana alam, akan memengaruhi lingkungan belajar dan mengganggu proses belajar. Sejalan dengan temuan tersebut, UNICEF (2024) menyatakan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan besar bagi sistem pendidikan. Di tahun 2024, lebih dari 242 pelajar di 85 negara mengalami disrupsi pembelajaran yang disebabkan oleh cuaca buruk ekstrem.

Sama seperti pendidikan, akses terhadap air bersih merupakan bagian krusial dari pemenuhan Hak-Hak Anak. Tersedianya air bersih di rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, baik untuk minum maupun untuk mencuci tangan, secara langsung berkontribusi terhadap kesehatan anak. Ketiadaan air bersih mengancam keseluruhan dari perkembangan anak, mulai dari kesehatan, pendidikan, bahkan rasa aman dari ancaman kekerasan, terlebih karena anak perempuan menjadi pihak yang paling terdampak. Sering kali tugas mengambil air jatuh pada perempuan dan anak, belum lagi pada musim kering, mereka harus berjalan lebih jauh untuk mencapai sumber mata air. Hal ini menyebabkan anak perempuan yang sedang menstruasi cenderung tidak bersekolah apabila tidak ada kecukupan air dan fasilitas sanitasi yang layak di sekolah.

Dalam Pasal 24 UNCRC, dinyatakan bahwa anak memiliki hak atas akses terhadap air bersih untuk minum, bukan hanya untuk air bersih untuk sanitasi. Menurut United Nations World Water Report (2024),

masih terdapat 2,2 miliar orang di dunia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih dan aman, termasuk juga 28 juta orang di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih (DetikFinance 2025). Hal ini memperjelas bahwa kurang lebih seperempat penduduk bumi ini mengalami masalah yang besar dalam hal ketersediaan air. Dalam kondisi demikian, yang paling terdampak adalah anak dan perempuan, terlebih anak perempuan. Data UNICEF (2021) menyebutkan bahwa sedikitnya 10 negara, termasuk Afghanistan dan Ethiopia, terdapat 70 persen anak mengalami kerentanan terhadap air yang tinggi hingga amat tinggi.

Indonesia tidak termasuk di dalam daftar 10 negara dengan kerentanan tertinggi di atas, tetapi Indeks Kelangkaan Air (*Water Scarcity Index*) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sebetulnya sebanding dengan

data dari 10 negara dengan kerentanan tinggi hingga amat tinggi tersebut. Lebih jauh lagi, data dari World Resource Institute (2024) menunjukkan bahwa NTT merupakan provinsi dengan risiko kelangkaan air tertinggi. Kekeringan dan kelangkaan air adalah sebuah realita yang saya temui selama saya bekerja di wilayah dampingan Plan Indonesia di NTT. Betapa dekatnya dan terdampaknya komunitas, perempuan, terutama anak-anak ketika air bersih sulit didapat. Semua betul-betul bermula dari air, mulai dari isu *stunting*, kesehatan, pertanian, pendidikan hingga kekerasan semua punya hubungan dengan air. Namun, sering kali ketersediaan air bersih atau akses terhadap air bersih luput dipertimbangkan sebagai prekondisi dari pembangunan manusia di daerah-daerah sulit air seperti di banyak desa di NTT, tempat Plan Indonesia bekerja.

Tabel 1
Tabel Akses Air Bersih per Kabupaten di NTT (2023–2024)

Kabupaten	AMH (Air Minum Layak)	Air Minum Aman	RT jarak air >1 km	RT waktu ambil air >30 menit	Catatan Penting
TTS	48 persen	12 persen	41 persen	38 persen	Salah satu akses air terburuk di Indonesia.
TTU	50 persen	13 persen	39 persen	35 persen	Sumur dangkal sering kering.
Sumba Timur	46 persen	10 persen	44 persen	42 persen	Kekeringan ekstrem, beban air perempuan tinggi.
Sumba Tengah	47 persen	11 persen	40 persen	37 persen	Air permukaan minim.
Sumba Barat Daya	49 persen	12 persen	38 persen	36 persen	Kekeringan panjang.
Lembata	52 persen	14 persen	35 persen	33 persen	Daerah pesisir & perbukitan kering.
Alor	58 persen	18 persen	29 persen	27 persen	Kekeringan musiman.
Flores Timur	60 persen	20 persen	26 persen	24 persen	Variasi antar kecamatan.
Malaka	55 persen	17 persen	30 persen	28 persen	Sungai musiman.
Nagekeo	62 persen	22 persen	24 persen	22 persen	Desa pedalaman masih rawan.
Sumba Barat	59 persen	19 persen	27 persen	25 persen	Lebih basah dari Sumba Timur.
Kab. Kupang	65 persen	25 persen	21 persen	19 persen	Masih ada desa kering.
Kota Kupang	82 persen	45 persen	5 persen	3 persen	Infrastruktur air terbaik.
Sikka	72 persen	32 persen	14 persen	12 persen	Relatif stabil.
Ende	70 persen	30 persen	16 persen	14 persen	Curah hujan cukup.
Ngada	68 persen	28 persen	18 persen	15 persen	Sumber air lebih banyak.
Manggarai	74 persen	35 persen	12 persen	10 persen	Relatif basah.
Manggarai Barat	76 persen	38 persen	10 persen	8 persen	Curah hujan tinggi.
Manggarai Timur	66 persen	26 persen	20 persen	18 persen	Beberapa kecamatan kering.

Sumber: Data diolah penulis dari BPS–Statistik Kesejahteraan Rakyat; BPS–Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024; BPS–Susenas Air Minum & Sanitasi 2023; PUPR–Cakupan Air Minum Layak (AMH) 2023; dan Kemenkes–Profil Kesehatan 2023

Jika dilihat dari Tabel 1, tiga daerah dampingan Plan Indonesia memiliki catatan buruk dalam hal akses terhadap air bersih. 38 persen dari penduduk TTS harus berjalan lebih dari 30 menit untuk mengakses air bersih. Di desa-desa Plan bekerja di kabupaten ini, bahkan lebih dari 50 persen penduduk hanya dapat mengakses air bersih lebih dari 30 menit. Hal ini disebabkan komunitas yang dipilih oleh Plan Indonesia adalah komunitas yang paling marjinal, termasuk dalam akses dan ketersediaan air. Hal serupa juga terjadi di dua daerah dampingan Plan Indonesia yang lain, yaitu Lembata dan Nagekeo, 33 persen dan 22 persen masyarakat masih harus berjalan menuju akses air bersih lebih dari 30 menit.

Dari dampingan Plan Indonesia (2025), dapat terlihat bahwa apabila pendidikan yang merupakan salah satu jalan untuk memperluas pilihan hidup anak perempuan dibatasi, maka hambatan terhadap pendidikan perlu dibaca sebagai persoalan yang lebih luas daripada sekadar akses sekolah atau akses air bersih. Ketika anak perempuan kehilangan waktu belajar karena mengambil air, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan memasuki perkawinan dalam kondisi agensi yang sangat terbatas, terlebih berbagai faktor sosial dan ekologis juga dapat saling tumpang-tindih dan memperkuat kerentanan.

Hal ini saya lihat di dalam salah satu kunjungan saya di tahun 2025 ketika suatu pagi buta berkunjung ke desa-desa. Ada anak-anak berjalan beriringan mengambil air ke sumber mata air terdekat, seperti yang digambarkan melalui tabel di atas. Bagi banyak penduduk NTT, jarak yang lebih dari 30 menit, tetap harus dilakukan walaupun bukan jarak yang mudah. Dengan keseharian perjalanan yang jauh dan melelahkan, anak yang bertugas mengambilnya seperti anak dalam usia Sekolah Dasar adalah konsekuensi logis bahwa mereka terkadang terlambat atau sudah kelelahan terlebih dahulu ketika sampai di sekolah dan tidak dapat mengikuti proses belajar dengan maksimal.

Dalam konteks di atas, keterlambatan datang ke sekolah karena harus mengambil air di pagi hari ini hanya salah satu hambatan dari banyak hambatan untuk bisa bersekolah yang dialami banyak anak-anak di dusun dan desa di daerah 3T. Faktor-faktor lain, selain kemiskinan di antaranya adalah letak sekolah yang jauh seperti halnya untuk anak-anak yang di SMP dan SMA. Selain itu, ketiadaan transportasi publik menjadi kendala. Apabila anak harus *mondok*, maka biaya pendidikan jadi membengkak karena *non-fee cost of education* bertambah. Terlebih, jika tidak bersekolah di dekat rumah, orang tua anak perempuan banyak juga yang khawatir akan keselamatan anak mereka. Perihal keamanan adalah faktor yang tidak dapat dikesampingkan karena kasus-kasus kekerasan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuan dalam perjalanan pulang sekolah, atau ketika mengambil air, sering terjadi (Plan Indonesia 2025). Untuk saya yang berasal dari kota besar dengan infrastruktur yang memadai, sangatlah memprihatinkan karena untuk mendapatkan hak mereka atas pendidikan, dan air bersih, masih banyak anak-anak yang harus menantang bahaya.

Jika melihat data dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) di NTT pada Tabel 2 di bawah, terutama di beberapa kabupaten tempat Plan Indonesia bekerja, maka tidak terlihat perbedaan berarti antara anak laki-laki dan perempuan di tingkat SD (7-12 tahun). Namun, ketika beranjak ke jenjang SMP (Tabel 3), mulai terlihat *gender gap* di APS, terutama di Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU). *Gender gap* ini makin menonjol di APS SMA (Tabel 4) dan bahkan perbedaannya mencapai 7,7 persen di TTS; 7,5 persen di TTU; dan 5,7 persen di Lembata. Sementara di Kota Kupang, walaupun ada *gender gap*, persentasenya jauh lebih kecil daripada wilayah pedesaan. Ketimpangan ini menunjukkan juga adanya ketimpangan pembangunan antara kota dan desa.

Tabel 2
APS Usia 7-12 Tahun (SD)

Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Catatan
Kota Kupang	99,5 persen	99,3 persen	Hampir setara
Kupang	99,0 persen	98,8 persen	—
TTS	97,6 persen	97,2 persen	—
TTU	97,3 persen	96,9 persen	—
Lembata	97,5 persen	97,1 persen	—
Nagekeo	98,3 persen	98,1 persen	—
Manggarai	98,7 persen	98,5 persen	—

Sumber: Persentase BPS (2025)

Tabel 3
APS Usia 13-15 Tahun (SMP)

Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Gender Gap	Catatan
Kota Kupang	97,2 persen	96,4 persen	0,8	Gap kecil
Kupang	93,1 persen	91,0 persen	2,1	Rural gap
TTS	89,1 persen	84,5 persen	4,6	Hotspot gender gap
TTU	89,0 persen	85,2 persen	3,8	Air & jarak
Lembata	90,2 persen	88,0 persen	2,2	Kekeringan
Nagekeo	91,0 persen	89,4 persen	1,6	—
Manggarai	94,1 persen	92,8 persen	1,3	—

Sumber: Persentase BPS (2025)

Tabel 4
APS Usia 16-18 Tahun (SMA)

Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Gender Gap	Catatan
Kota Kupang	89,1 persen	87,4 persen	1,7	Urban gap kecil
Kupang	80,2 persen	77,4 persen	2,8	Rural–urban divide
TTS	71,2 persen	63,5 persen	7,7	Gap terbesar di NTT
TTU	72,0 persen	64,5 persen	7,5	Air & kemiskinan waktu
Lembata	75,1 persen	70,1 persen	5,0	Kekeringan
Nagekeo	75,8 persen	72,3 persen	3,5	—
Manggarai	81,7 persen	78,8 persen	2,9	—

Sumber: Persentase BPS (2025)

Pola ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kekurangan air menyebabkan anak perempuan putus sekolah. Namun, ketika dibaca bersama data akses air, jarak geografis, kemiskinan, dan pengalaman lapangan, pola tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di wilayah kering tidak dapat dilepaskan dari kondisi material yang membentuk kehidupan sehari-hari anak perempuan.

Amartya Sen (1999) & Martha Nussbaum (2011) melalui *Capability Approach*, menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar menyediakan layanan, tetapi memastikan kapabilitas dapat menjadi kebebasan nyata untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam konteks air bersih dan pendidikan di wilayah kering di NTT, jika menggunakan pendekatan Sen & Nussbaum, maka kekeringan dianggap membatasi kebebasan yang bersifat *real* dan minimnya akses air akan mengurangi kapabilitas. Dalam pengertian ini, persoalan air, bukan hanya sekadar persoalan ketersediaan sumber daya, tetapi persoalan apakah anak perempuan, benar-benar memiliki kebebasan untuk menggunakan waktu dan energinya untuk belajar, bermain, beristirahat, dan menentukan masa depannya.

Perempuan di Tengah Kemarau Panjang

Dalam perjalanan saya, mendatangi atau mendekatkan sumber air bersih ke dusun dan desa terpencil bukan semata-mata masalah teknis. Secara teknis, ada dusun-dusun yang memang tidak memiliki sumber mata air atau jauh letaknya. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat sipil seperti Plan Indonesia. Dari mulai membuat sumur bor, menarik pipa berkilo-kilo meter dari sumber mata air, melewati bukit dan lembah, atau membuat embung dan inovasi “tanam air” seperti yang kami lakukan di Lembata. Sebagai organisasi yang tidak memiliki *core competency* dalam pembangunan air bersih, di awal-awal kami belajar banyak dari beberapa kegagalan karena memang kondisi medan dengan tanah berbatu atau berkarang tidaklah mudah.

Dari hasil refleksi kami yang paling rumit adalah memastikan kesiapan masyarakat secara sosial dan adat. Dari sisi manajemen sumber daya air, pengelolaan dan perawatan sumber air bersih yang dibangun, memastikan bahwa pemilik lahan yang dilalui pipa

atau yang menjadi sumber dari air bersih tersebut (lokasi mata air) bersedia dan rela menjadi bagian dari upaya pengadaan air bersih untuk keluarga, komunitas, bahkan dusun lain. Dalam konteks masyarakat yang praktik-praktik adat masih sangat kental, tim kami harus memastikan bahwa semua unsur pemuka adat, agama, dusun, dan desa diajak bicara. Kami pun mengajak bicara para mama-mama karena tanpa keterlibatan mereka, fasilitas air bersih yang dibangun bisa jadi tidak optimal membawa perubahan dalam hal akses yang lebih baik dan aman bagi para perempuan dan anak. Tanpa keterlibatan para pengambil keputusan setempat, kemungkinan terdapat pihak-pihak yang melakukan sabotase fasilitas air bersih yang sudah dibangun, sebagaimana yang pernah kami alami. Perempuan setempat harus terlibat dalam menjaga mata air dan fasilitas air bersih karena mereka yang paling terdampak dan dapat membawa masukan penting terkait isu air bersih.

Dalam norma patriarkal yang mengakar di NTT, perempuan dianggap bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, termasuk air, sementara laki-laki fokus pada pekerjaan luar rumah. Peran perempuan dan air dalam adat NTT sangat erat karena air bukan sekadar kebutuhan fisik tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual. Dalam banyak komunitas adat di NTT, perempuan diposisikan sebagai penjaga kehidupan melalui peran mereka dalam mengelola air untuk keluarga dan komunitas. Di beberapa suku, perempuan terlibat dalam ritual yang berkaitan dengan sumber air (mata air, sungai), misalnya dalam doa atau persembahan untuk menjaga kesucian dan keberlanjutan sumber air. Air sering dipandang sebagai lambang kehidupan dan kesuburan dan perempuan sebagai “pembawa kehidupan” diposisikan dekat dengan simbol ini. Dalam adat NTT, perempuan sesungguhnya bukan hanya pengambil air tetapi juga penjaga nilai, tradisi, dan kehidupan.

Meskipun demikian, kenyataan yang saya temui di lapangan adalah adanya pendekatan tebang pilih. Misalnya, ketika bicara tanggung jawab sosial dan adat, perempuan memikul beban ketika bicara tanggung jawab, tetapi ketika bicara hak, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidupnya, perempuan dipaksa absen atau dipinggirkan. Perempuan sering kali ditempatkan sebagai pendengar dalam rapat-rapat desa—terlebih jika tema rapatnya berjudul “proyek”.

Pola “tanggung jawab tanpa kuasa” ini tidak hanya terlihat dalam pengelolaan air. Ia dapat muncul pula dalam institusi keluarga dan perkawinan. Dalam komunitas tertentu misalnya, praktik belis dan tata hubungan antarkeluarga dalam perkawinan dapat menempatkan perempuan pada posisi yang kompleks dan perempuan menjadi pusat reproduksi kehidupan keluarga, tetapi belum tentu memiliki posisi tawar yang sama dalam menentukan keputusan yang menyangkut hidupnya. Karena itu, pembagian kerja terkait air, akses terhadap pendidikan, dan institusi perkawinan perlu dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang saling berkelindan, bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Dimensi ekologis ketimpangan dijelaskan melalui *Feminist Political Ecology* (Rocheleau, Slayter, & Wangari 1996), yang menekankan bahwa akses terhadap sumber daya alam, termasuk air, selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan struktur gender. Dalam masyarakat agraris dan kering seperti NTT, krisis air tidak hanya merupakan persoalan ekologis. Ia juga menjadi persoalan sosial dan gender. Beban pengelolaan air yang lebih besar pada perempuan menciptakan siklus ketimpangan waktu (*time poverty*), yang kemudian membatasi partisipasi mereka dalam ruang publik dan bagi anak perempuan dalam pendidikan.

Tabel 5
10 Kabupaten dengan Tingkat Kekeringan Ekstrem

Kabupaten	Tingkat Kekeringan	Indeks SPI (BMKG)	Karakteristik Kekeringan	Catatan Penting
Timor Tengah Selatan (TTS)	Ekstrem	-1,8	Kekeringan kronis 7–9 bulan	Hotspot beban air perempuan tertinggi
Timor Tengah Utara (TTU)	Ekstrem	-1,7	Sumur dangkal sering kering	Dropout perempuan tinggi
Sumba Timur	Ekstrem	-2,0	Salah satu daerah terkering di Indonesia	Curah hujan sangat rendah
Sumba Tengah	Ekstrem	-1,9	Kekeringan tahunan	Waktu ambil air 2–4 jam
Sumba Barat Daya (SBD)	Ekstrem	-1,6	Kekeringan panjang	Desa terpencar, akses air buruk
Lembata	Ekstrem	-1,5	Air permukaan minim	Kekeringan pesisir & perbukitan
Alor	Tinggi	-1,2	Kekeringan musiman	Akses air terbatas di pedalaman
Flores Timur	Tinggi	-1,1	Variasi antar kecamatan	Kekeringan pesisir
Malaka	Tinggi	-1,1	Air permukaan terbatas	Sungai musiman
Nagekeo	Tinggi	-1,0	Kekeringan 4–6 bulan	Beberapa desa rawan air

Sumber: Data diolah penulis dari BMKG: SPI & Indeks Kekeringan Terpadu 2023–2024; BNPB; PUPR; BRIN

Tabel 5 menunjukkan 10 kabupaten di NTT dengan tingkat kekeringan ekstrem yang terlihat adanya konsistensi dengan tabel-tabel sebelumnya. Misalnya di daerah dengan kekeringan ekstrem, akses air bersih belum dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat di kabupaten tersebut. Data pendidikan juga menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung lebih banyak yang *dropout* sekolah. Hal ini bertolak belakang dengan partisipasi dalam pendidikan seperti yang terefleksikan pada APS yang lebih rendah—daripada anak laki-laki.

Pola dalam data tersebut konsisten juga dengan pengalaman lapangan yang saya temui di dusun dan desa yang kerap mengalami kekeringan di NTT, terutama di Kabupaten TTS. Kekeringan tidak bersifat netral. Ia bergerak bergender dan menjadi fenomena sosial-ekologis yang diperparah dengan perubahan iklim. Dampak dari kekeringan lebih berat kepada perempuan dan anak perempuan, rumah tangga miskin, terlebih di wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten. Ketika air tidak tersedia, lebih banyak anak perempuan yang absen atau bahkan putus sekolah yang menyebabkan anak perempuan kekurangan kapabilitas atau bahkan kehilangan masa depan.

Interseksionalitas: Gender, Pendidikan dan Air Bersih

Ketika anak-anak di desa mengatakan dengan gembira “*Air su dekat*”, ungkapan itu bukan semata-mata bicara mengenai air. Saya merasa terharu ketika pada sebuah acara peresmian air bersih di sebuah desa di Kabupaten TTS. Anak-anak gembira karena sekarang mereka bisa mandi sebelum berangkat sekolah. Untuk anak-anak perempuan, hal ini juga berarti sanitasi dan kesehatan menstruasi menjadi lebih baik. Bukan hanya air yang menjadi lebih dekat, tetapi juga pendidikan dipermudah dengan adanya air. Paling tidak, sisi prekondisi untuk sebuah proses belajar menjadi lebih baik, ketersediaan air bersih merupakan bagian dari solusi.

Interseksionalitas menjelaskan bahwa ketidakadilan akses air bersih dan ketidaksetaraan pendidikan tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi (misal melalui gender atau kemiskinan saja), tetapi dari persilangan berbagai identitas dan struktur kekuasaan—gender, kelas, lokasi geografis, etnisitas, dan status sosial (Crenshaw 2017). Dalam konteks air bersih, penelitian menunjukkan bahwa kelompok tertentu, misalnya

perempuan miskin di wilayah kering, mengalami beban yang jauh lebih berat karena mereka berada di titik persilangan berbagai bentuk kerentanan. Dalam konteks NTT, perempuan dan anak perempuan tidak hanya menghadapi ketimpangan berbasis gender, tetapi juga ketimpangan berbasis wilayah dan kemiskinan. Hal ini terlihat jelas dalam beban kerja domestik yang tidak proporsional, terutama terkait pengambilan air, yang berdampak langsung pada waktu belajar, kehadiran sekolah, dan peluang pendidikan jangka panjang.

Dalam konteks tulisan ini, persilangan tersebut perlu mencakup usia dan posisi seseorang dalam struktur keluarga serta institusi perkawinan. Anak perempuan dari keluarga yang tidak mampu di wilayah yang kekurangan air, tidak hanya menghadapi beban gender dan kemiskinan, tetapi juga memiliki pilihan hidup yang dipengaruhi oleh norma keluarga, ekspektasi, dan dalam komunitas tertentu, praktik belis. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh perempuan yang dijabarkan di atas tidak hanya terbatas pada isu budaya yang berada di luar persoalan air dan pendidikan. Berbagai faktor di atas saling terkait secara berlapis dan simultan yang menunjukkan bagaimana ketimpangan gender dapat direproduksi melalui institusi sosial, sementara kekurangan air dan terbatasnya pendidikan akan mempersempit pilihan yang tersedia bagi perempuan.

Penutup

Melalui tulisan ini, perjalanan aktivisme selama ini, saya refleksi dengan data pendukung, yang diharapkan akan mengungkap bahwa persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan sebatas sektoral. Air bukan hanya sebagai persoalan infrastruktur, sebagaimana pendidikan bukan hanya persoalan sekolah. Keduanya berhubungan dengan siapa yang memiliki waktu, siapa yang memiliki suara, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya.

Di wilayah NTT yang rentan dengan kekeringan, beban kekurangan air tidak terdistribusi secara netral. Perempuan dan anak perempuan sering memikul tanggung jawab terbesar dalam pengambilan dan pengelolaan air, sementara pada saat yang sama, memiliki ruang yang lebih terbatas dalam pengambilan keputusan. Ketika kondisi tersebut bersinggungan

dengan kemiskinan, jarak geografis, norma gender, terbatasnya akses pendidikan dan institusi perkawinan—termasuk praktik belis dalam komunitas tertentu—ketimpangan dapat direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Karena itu, pemenuhan hak anak atas pendidikan memerlukan lebih dari sekadar pembangunan sekolah. Pemenuhan hak anak juga membutuhkan pemenuhan hak atas air, pengurangan beban kerja domestik anak perempuan, perluasan agensi perempuan, serta transformasi norma dan institusi sosial yang membatasi pilihan anak-anak perempuan. Air bersih memang merupakan salah satu prekondisi pendidikan. Namun, pelajaran yang lebih luas diharapkan muncul dari tulisan ini bahwa infrastruktur hanya akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan ketika ia berjalan bersama perubahan relasi kuasa.

No Education without Clean Water—but also no lasting educational justice without gender justice.

Daftar Pustaka

- Allen, K. R. & Piercy, F. P. 2005. Feminist Autoethnography. *Research Methods in Family Therapy*, 2, pp. 155-169.
- Becker, G. 1993. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 3rd ed. University of Chicago Press: Chicago.
- BMKG. 2024. SPI & Indeks Kekeringan Terpadu 2023–2024. Badan Meteorologi dan Geofisika.
- BNPB. 2026. BNPB Siapkan Upaya Mitigasi Kekeringan di Nusa Tenggara Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diakses pada 20 Mei 2026 di <https://www.bnpb.go.id/berita/bnpb-siapkan-upaya-mitigasi-kekeringan-di-nusa-tenggara-barat>.
- BPS NTB. 2024. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- BPS NTB. 2025. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 16-18 Tahun. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- BPS. 2023. Air Minum & Sanitasi. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023. Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2024. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024. Badan Pusat Statistik.
- BPS. Indikator Pendidikan, 1994-2025. Terakhir diperbarui 15 Desember 2025. Diakses pada 20 Juni 2026 di <https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/1/MTUyNSMx/indikator-pendidikan--1994-2025.html>.

- Crenshaw, K. 2017. *On Intersectionality: Essential Writings*. The New Press: New York.
- Denzin, N. K. 2014. Writing and/as Analysis or Performing the World. *The SAGE Handbook of Qualitative data Analysis*, pp. 569-584.
- DetikFinance. 2025. 28 Juta Warga RI Masih Sulit Dapat Air Bersih. Diakses pada 22 Mei 2026 di <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7966210/28-juta-warga-ri-masih-susah-dapat-air-bersih>.
- Distankp NTT. 2026. NTT Siaga El Nino 2026, Dinas Pertanian Terapkan Strategi Mitigasi Komprehensif. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diakses pada 20 Mei 2026 di <https://distankp.nttprov.go.id/ntt-siaga-el-nino-2026-dinas-pertanian-terapkan-strategi-mitigasi-komprehensif/>.
- Ellis, C. 2004. *The Ethnographic I: A Methodological Novel about Autoethnography* (Vol. 13). Bloomsbury Publishing PLC.
- Freire, P. 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum: New York.
- Gilligan, C., Lyons, J., & Hamner, T. 1990. *Making Connections: The Relational Worlds of Adolescent Girls at Emma Willard School*. Harvard University Press: Cambridge, MA.
- Kemenkes. 2023. *Profil Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemen-PPN/Bappenas. 2025. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian PUPR. 2023. *Cakupan Air Minum Layak (AMH)*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Nussbaum, M. 2000. *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press: Cambridge, MA.
- Nussbaum, M. 2011. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, MA.
- Pemerintah Indonesia. 1990. Keputusan Presiden Nomor 36/1990. Pemerintah Republik Indonesia.
- Plan Indonesia. 2025. "Air Bersih untuk Mama Eta dan Eci". Plan Indonesia. <https://planindonesia.org/en/clean-water-for-mama-eta-and-eci%20%20>.
- Plan Indonesia. 2025. "Dua Menit Menuju Harapan: Kisah Deci dan Linda Menggapai Air Bersih". Plan Indonesia. <https://planindonesia.org/dua-menit-menuju-harapan-kisah-deci-dan-linda-menggapai-air-bersih/>.
- Plan Indonesia. 2025. *Laporan Tahunan Plan Indonesia 2025*. Plan Indonesia.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. 1996. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. Routledge: New York, London.
- Schultz, T. 1961. "Investment in Human Capital". *The American Economic Review* Vol. 51, No. 1. pp. 1-17.
- Schultz, T. 1963. *The Economic Value of Education*. Columbia University Press: New York.
- Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf: New York.
- Tribun Flores. 2025. "Belasan Ribu Anak di NTT Tidak Sekolah Karena Tidak Mau, Tidak Ada Biaya dan Jarak Tempuh". Diakses pada 20 Mei 2026 di <https://flores.tribunnews.com/2025/07/11/belasan-ribu-anak-di-ntt-tidak-sekolah-karena-tidak-mau-tidak-ada-biaya-dan-jarak-tempuh?page=2>.
- UNESCO. 2025. *The Right to Education: Past, Present and Future Directions*. UNESCO: France. <https://doi.org/10.54675/GONT9347>.
- UNICEF UK. 2021. *Access to Clean Water*. Diakses pada 25 Mei 2026 di <https://www.unicef.org.uk/what-we-do/water-and-sanitation/access-to-clean-water/>.
- UNICEF. 2024. *Global Snapshot: Climate-Related School Disruptions 2024*. Diakses pada 25 Mei 2026 di <https://www.unicef.org/media/170626/file/Global-snapshot-climate-related-school-disruptions-2024.pdf>.
- United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child*. New York. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.
- UN-Water. 2024. *UN World Water Development Report 2024*. Diakses pada 18 Mei 2026 di <https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2024>.
- World Resource Institute. 2023. *Aqueduct 4.0 Current and Future Country Ranking*. Diakses pada 20 Mei 2026 di https://www.wri.org/data/aqueduct-40-country-rankings?utm_source=copilot.com.

Catatan Kaki

- 1 IKIP atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah cikal bakal dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
- 2 Dua kampanye besar ketika saya terlibat selama di Oxfam adalah GROW Campaign dan Inequality Campaign. Keduanya menyoroti kegagalan dan ketidakadilan sistem baik di tingkat lokal maupun global. GROW Campaign berfokus pada ketidakadilan dari sistem pangan, yang meletakkan kepentingan bisnis dan pemodal di atas keadilan bagi produsen dan konsumen pangan. Sementara, Inequality Campaign menonjolkan ketimpangan sistem ekonomi secara keseluruhan yaitu sebagian kecil orang menguasai kekayaan (*wealth*) yang jauh melampaui bermiliar-miliar orang di dunia. Saya menjadi bagian kunci dari publikasi yang menunjukkan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan kekayaan 120 juta orang termiskin.
- 3 RLS untuk Kota Mataram, ibu kota Provinsi NTB, 10,59 (laki-laki) dan 9,27 (perempuan).
- 4 Budaya Merarik adalah budaya kawin lari dalam tradisi Suku Sasak, yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Merarik memiliki makna keberanian, keseriusan, bertanggung jawab, dan keteguhan mewujudkan pernikahan dan menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Banyak kontroversi yang saya temui dalam pelaksanaannya yaitu

- sering kali Merarik dijadikan jalan pintas untuk memaksakan pernikahan dini, yang masih banyak terjadi di NTB.
- 5 Situasi ini adalah kondisi sebelum usia minimum pernikahan bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun di akhir 2020 dan sebelum pandemi COVID-19, ketika banyak pekerja migran berasal dari NTB dipulangkan.
- 6 El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang memengaruhi pola cuaca global, termasuk menurunnya curah hujan di Indonesia.